

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TOINI KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO

Oleh : Imanuel N. Tadanugi

Abstrak : Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pembangunan di Desa Toini kecamatan Poso pesisir Kabupaten Poso, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Toini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah populasi yang di ambil adalah 17 Orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan di Desa Toini sudah cukup baik oleh karena itu Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kemampuan yang tepat, cepat, dan praktis, dan rasional dalam pengambilan keputusan, dan pemerintah Desa Toini juga harus dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan aparat lainnya. Agar proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme dan harapan masyarakat Desa Toini.

Kata Kunci : *Implementasi, Perencanaan, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, lebih diarahkan pada upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal 63 peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Desa, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Landasan mengenai peraturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan

pola pemikiran di maksud, di mana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparasi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Toini merupakan rencana strategi Desa Toini untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Apabila dilaksanakan dengan baik pasti sebuah

perencanaan yang memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Kantor desa sering kita jumpai sistem kerja yang berdasarkan hirarki, di mana pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, memberikan konsep-konsep dalam penentuan pelaksanaan pembangunan, yang tentunya harus diejawantahkan oleh para staf yang dibawahnya. apabila kemampuan dari staf yang ada masih dalam taraf yang rendah, maka dapat dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam menganalisa apa yang dimaksudkan oleh pimpinannya.

Demikian pula halnya dengan peran dari seorang kepala desa sebagai aparatur pemerintah yang ada di desa, apabila tidak mampu untuk mengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yang ada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pembangunan terlebih khusus pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang dipimpinya. Oleh karena itu peranan dari aparatur pemerintah sangat ditentukan kualitas sumber daya dari aparatur pemerintah yang tidak tanggap terhadap permasalahan yang ada di desa, akan menimbulkan kepicangan dalam penyelenggaraan pemerintahan apalagi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk desa, tentunya harus menunggu Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa Toini merupakan kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah yang ada, demi mencapai suatu pembangunan yang baik untuk negara kita. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa Toini. Permasalahan yang di

hadapi Desa Toini sekarang ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana transportasi pertanian yang memadai, masih banyak jalan kebun yang harus di bangun, serta jalan desa yang perlu ditingkatkan, drainase masih belum memadai, sarana air bersih yang masih menjadi kendala pada musim panas, penyakit yang masih sering terjadi baik musim panas dan pada musim hujan, serta pemanfaatan lahan pertanian belum maksimal karena petani masih kurang modal dan masih kurang sarana. Yang perlu di perhatikan oleh pemerintah yang ada di desa Toini demi mewujudkan suatu tujuan nasional. Penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Implementasi Perencanaan Pembangunan Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”.

TEORI DAN KONSEP

Pengertian implementasi dalam kamus besar Indonesia ialah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Tachan 2008 dalam *Webster's Dictionary* menyebutkan “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *impementation*, berasal dari kata *to implement*, kata *to impement* berasal dari bahasa latin *implementum*”. Selanjutnya kata *to implement* dimaksud sebagai : pertama, *to implement* di maksudkan “Membawa ke suatu hasil (akibat) melengkap dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* di maksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan widavsky mengemukakan bahwa, *implementasi as to carry out, accomplish fulfill produce, complete*”. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai

suatu aktivitas yang bertalian dengan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan penggunaan saran (alat) untuk memperoleh hasil.

Konsep Pemerintah

Menurut Poerwadaminta W. J. S dalam Pamudji S. (1992:36) menjelaskan bahwa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan misalnya mereka sudah siap tinggal menunggu perintah.
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu, negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet pemerintahan).

Menurut Bayu Suryaninggrat (1980:1) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan menunjuk pada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi dan bidang tugas pekerjaan itu. dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintahan pada subjek.

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, kalau mengikuti pembidangan oleh Mostesqieu dalam Bayu Suryaninggrat (1980:12) pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara, dalam bidang eksekutif saja.

Istilah pemerintah dan pemerintahan tercangkup dalam satu kata yaitu: “*government*” yang diturunkan dari kata “*to govern*” mempunyai arti :

- Melaksanakan wewenang pemerintah
- Cara atau sistem memerintah

- Fungsi atau kedudukan untuk memerintah
- Wilayah atau negara yang di perintah
- Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara. Bayu Suryaninggrat, (1980:11)

Dalam buku memahami ilmu pemerintahan, muhadam labolo. istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok yaitu :

- Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, di mana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
- Pemerintah menunjukkan pada keberadaan di mana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
- Pemerintah menunjukkan secara langsung *person* (orang) yang menduduki jabatan-jabatan Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- Pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem Pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah.

Pemerintahan mempunyai arti luas dan arti sempit yaitu pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (di sebut eksekutif). dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (di sebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (di sebut yudikatif), pamudji s. (1983).

Jadi, pemerintah adalah suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi dalam suatu negara yang mempunyai fungsi/tugas yang mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan

yang berdasarkan struktur/hirarki yang ada di negara kita ini.

Konsep Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah berasal dari dua kata yang berbeda dan mempunyai ikatan atau hubungan yang erat. yang pertama kata Aparatur yaitu kata yang mempunyai akhiran Aparat (ur) yaitu pegawai negeri sipil, alat / perkakas (alat negara), aparat pemerintah sedangkan pemerintah menunjukkan pada hubungan memerintah dan yang di perintah jadi berbicara Aparatur pemerintah yaitu memiliki fungsi ganda dalam pemerintahan yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur Pemerintah juga sebagai abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas pembangunan, serta sebagai abdi masyarakat, yakni melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan (menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir). Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan di landasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasi, dan tata kerja ter-

masuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Jadi, aparatur pemerintah dapat dikatakan sebagai alat negara atau abdi negara yang memiliki kemampuan profesional tinggi yang menjalankan tugas secara disiplin, efektif dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya (spesialisasi) masing-masing dalam sistim administrasi di bidang pemerintahan, serta terikat dengan aturan-aturan yang berlaku.

Konsep Pembangunan

Pembangunan seperti yang di ungkapkan oleh para ahli Menurut Tjokroamidjoja dan Mustapadjaja (1990) mengungkapkan pendapat "*united naton development administration: current approaches and trends in public administrtion for national developmen*", bahwa pengertian pembangunan harus di lihat secara dinamis, bukan di lihat secara statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pembangunan adalah merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining proces*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha memerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu "*innerwil*", proses imansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan, Prof Dr. Ismail Nawawi, Msi.

Pembangunan berarti harus ada pemerintah yang melaksanakan desentralisasi dan mampu menjalankan perubahan yang besar demi kemajuan suatu daerah yang di lihat dari aspek pokok (geografi, ekonomi, kota dan desa, dan administrasi) yang memainkan peranan penting dalam hubungan pusat dan daerah.

Dan akhirnya menjadi suatu perubahan pembangunan pada semua lapisan masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang baik, Collin mac andrews ichasul amal.

Di sisi lain pendapat Siagian P Sondang mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*). selanjutnya siagian p sondang mengatakan bahwa apabila definisi sederhana di atas di simak secara cermat, maka muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok.

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, jangka pendek.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
- f. Modernitas yang ingin di capai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional.
- g. Semua hal yang telah di singgung di atas ditunjukkan kepada usaha

pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karna mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Selanjutnya pendapat dari Dr. Sukarna dalam buku sistem politik indonesia. Pembangunan berarti suatu usaha pembinaan yang dilakukan secara sadar, teratur dan terus-menerus menuju pada suatu peningkatan kualitas.

Jadi, pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tanpa akhir dan terus-menerus yang dilakukan secara terencana, sadar, baik dan di bantu oleh pemerintah agar seluruh program dapat di desentralisasikan, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, jangka pendek dan mengarah pada modernitas dan mampu memantapkan keberadaan kita dan sama dengan negara lainnya.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis terhadap implementasi perencanaan pembangunan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Adapun dasar penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dan objek yang di teliti tentang implementasi perencanaan pembangunan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang diolah sehingga memperoleh hasil penelitian dalam memecahkan sebuah masalah sedangkan informasi penelitian bersumber dari pegawai kantor desa dan masyarakat Desa Toini sebagai berikut :

1. Kapala Desa	1 Orang
2. Sekretaris	1 Orang
3. Kepala Urusan/Kasi	4 Orang
4. Staf/masyarakat	11 Orang.
Jumlah	17 Orang

Untuk obyektifnya data, maka yang menjadi informan kunci adalah Camat Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu untuk menjelaskan secara detail mengenai kajian penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian tentang Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir. Kabupaten Poso. Sedangkan lokasi penelitian adalah Kantor Desa Toini. Adapun yang menjadi obyek penelitian yakni aparatur dan Masyarakat Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana Peran dari Aparatur Pemerintah Menggerakkan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan yang Berkaitan Dengan Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan peran aparatur pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, aparatur pemerintah diberikan pembinaan sesuai dengan tingkat dan keahlian masing-masing bidangnya, pemberian penataran khusus bagi perangkat-perangkat desa (aparatur pemerintah) dalam peningkatan hasilnya

belum dapat diandalkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah desa yang melakukan berbagai pelanggaran seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya pengabdian dalam melaksanakan pembangunan tugas sehari-hari, rendahnya tingkat keahlian dan ketrampilan yang ada pada aparatur pemerintah desa, penempatan personil yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, kemudian di tambah lagi tingkat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai. Dari pelaksanaan pembangunan di atas, ada juga masalah yang harus dihadapi oleh aparatur pemerintah yaitu masalah sikap mental yang lemah dalam mengambil keputusan.

Dalam Pelaksanaan pembangunan di desa maka aparatur pemerintah di tuntut memiliki kemampuan yang mampu menjaring semua data (masukan) dari masyarakat agar data alternative tersebut bisa menjadi data yang relevan, mampu memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan serta menilai hasil yang di peroleh demi kemajuan daerah/desa tersebut, tugas yang di emban dalam wilayah desa cukup rumit sehingga butuh pemecahan masalah agar semua bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selain itu tugas penyelenggaraan pemerintah juga bergantung pada bidang pemerintah, pembangunan, kemasyaratan, serta tugas-tugas administratif. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam hal ini tergantung pada kepala desa dan bawahannya. Karena tanpa kerja sama antara kepala desa dan dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas tertentu akan mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kemampuan yang

tepat, cerdas, praktis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan, pendelegasian tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada di desa seperti pendelegasian tugas kepada sekertaris desa, kepala jaga dan maweteng, kepala urusan (kaur) yakni kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan di bantu oleh BPD. Jadi peran kepala desa sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hasil temuan menunjukkan kepala desa sering melakukan rapat dengan bawahannya untuk mengetahui seberapa besar perkembangan tiap-tiap lingkungan/jaga dari masing-masing bawahannya yang sudah diberikan tugas demi kemajuan desa tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 tahun 2014).

Kinerja aparatur pemerintah di desa ditentukan oleh pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal ini pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan seperti meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, dedikasi dan ketrampilan seperti meningkatkan pendayagunaan para bawahan yang ada. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan aparatur pemerintah yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga semangat pengabdian yang tanpa pamrih bagi aparatur pemerintah sangat diharapkan. namun semuanya tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah itu sendiri karena merekalah

yang menentukan sikap dan perilakunya masing-masing.

B. Penyelenggaraan Tugas oleh Pemerintah

Penyelenggaraan tugas oleh pemerintah dalam menghadapi pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa Toini telah menjadi perhatian utama. Sejalan dengan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus-menerus agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa sehingga mampu menggerakkan pembangunan secara lancar dengan di landasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat.

Dengan demikian peran aparatur pemerintah desa menjadi motor penggerak di dalam usaha melaksanakan kegiatan pembangunan nasional menjadi sangat penting. Dalam penyelenggaraan tugas yang di emban oleh aparatur pemerintah di desa khususnya Desa Toini berpatokan pada struktur organisasi pemerintah desa serta berbagai peran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. dalam struktur organisasi pemerintah desa, kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa di bawah pertanggung jawaban Bupati/Camat. Sekertaris desa di bawah pertanggung jawaban kepala desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada kepala jaga dan kepala urusan.

Usaha yang dilakukan dalam rangka. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas, antara lain pemberian pembinaan sesuai dengan

tingkat dan keahlian masing-masing dibidangnya, pemberian penataran khusus bagi perangkat-perangkat kabupaten maupun kota serta provinsi.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penulisan penelitian ini maka di uraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. RPJM Desa Toini di tuntutan oleh masyarakat, supaya aparatur pemerintah lebih pro aktif dalam melaksanakan dan bertanggung jawabkan agar mempunyai manfaat di desa ini.
2. Masyarakat desa Toini sangat menginginkan seorang pemimpin (kepala desa) yang mampu menjalankan roda pemerintahan serta mampu mewujudkan setiap visi, misi, kebijakan dan strategi di dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Pemerintah juga harus melakukan pembinaan, penataran, rekruturisasi dengan sebaik mungkin.
4. Dalam penyelenggaraan tugas aparatur pemerintah Desa Toini yang berpatokan pada struktur organisasi pemerintah serta peran dari seorang kepala desa.
5. Kepala Desa adalah pemimpin/kepala pemerintahan yang tertinggi di desa sesuai struktur yang ada. di bawah pertanggung jawaban Bupati/Camat.
6. Pelaksanaan tugas yang diembankan sangat rumit makanya di perlukan pemecahan masalah. Pelaksanaan tugas yang di emban tergantung pada keberhasilan dari bawahannya dalam bidang masing-masing seperti sekertaris desa, kepala jaga dan maweteng, dan kepala urusan (pemerintahan, pembangunan, umum).
7. Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kemampuan yang tepat, cepat, dan praktis, dan rasional dalam pengambilan

keputusan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah harus dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan aparat lainnya. Agar proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme kinerja dari aparatur pemerintah dalam pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu menciptakan aparatur pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin maka semangat kerja pengabdian yang tanpa pamrih atau sesuai dengan yang di harapkan.

8. Dari hasil penelitian peran aparatur pemerintah Desa Toini sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan.

SARAN

1. Mengingat tugas yang di emban oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan sarana dan prasarana Desa Toini sangat rumit maka di perlukan aparatur yang berkualitas.
2. pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan sarana dan prasarana di Desa Toini tidaklah mudah karena itu diharapkan kiranya segenap komponen masyarakat dapat bekerja sama dan turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Toini.
3. Diharapkan kebijaksanaan dari pemerintah desa hal ini kepala desa untuk memperhatikan bawahannya yaitu dengan menambah insentif supaya mereka lebih proaktif dalam membantu melaksanakan roda pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Suryaninggrat. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.

Colin Mac Andrews dan Ichaul Amal. *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muhadam Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Penerbit Raja Grafindo Persada Maret 2010 cetakan ke 4. Jakarta.

Mustapadjaja. 2003, *Paradigma-Paradigma Pembangunan, Dan Saling Hubungan Dengan Model, Strategi, Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan, Lembaga Negara*.

Nawawi Ismail Prof, Dr, MSi. *Pembangunan dan Problem Masyarakat*. CV Putra Media Nusantara 2009. Surabaya.

Pamudji S. 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Bina Aksara. Bandung.

Poerwardaminta W, J, S. 1993, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Sukarna Drs. *Sistem Politik Indonesia II*. Penerbit Mandar Maju 1992. Bandung.

Siagian P Sondang. 1983, *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro. 1984, *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

Vicktor Situmorang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Kawasan Melekat*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Vredembregt J. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PTGamedia. 1983. Jakarta.

Sumber lainnya :

- Buku Dokumen Desa Toini tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa).
- Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Otonomi Daerah*.
- Undang – Undang Republik Indonesia 12 Tahun 2004. *Otonomi Daerah*. Penerbit Citra Umbara April 2004. Bandung.
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.